

---

## Edukasi Politik: Partai-Partai Islam dalam Kontestasi Pemilu 2024

Ali Noer Zaman<sup>1</sup>, Usni Hasanudin<sup>2</sup>, Ma'mun Murod<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

✉ Email Korespodensi: [alinoerzaman@umj.ac.id](mailto:alinoerzaman@umj.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel:

Diterima 15-02-2026

Disetujui 25-02-2026

Diterbitkan 27-02-2026

#### Katakunci:

Partai Islam,  
Pemilu 2024,  
Masjid Attanwir  
Bojongsari,  
Umat Islam

### ABSTRAK

Artikel merupakan hasil dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Masjid At-Tanwir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Masjid dipilih sebagai sarana pelaksanaan pengabdian karena masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi juga merupakan sarana berbagai kegiatan sosial, termasuk pendidikan politik. Peserta adalah jamaah masjid. Pengabdian dalam bentuk ceramah tentang perkembangan partai-partai Islam di Indonesia sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perolehan partai Islam mengenai penurunan sejak zaman Reformasi. Bahkan di Pemilu legislatif tahun 2024, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang masih mampu melenggang ke Senayan. Pengabdian ini diakhiri dengan tanya jawab tentang kemungkinan partai Islam memenangkan pemilu.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Noer Zaman, A., Hasanudin, U., & Murod, M. (2026). Edukasi Politik: Partai-Partai Islam dalam Kontestasi Pemilu 2024. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 419-429. <https://doi.org/10.63822/ztj38x29>

---

## PENDAHULUAN

Pemilu legislatif tahun 2024 merupakan sebuah kesempatan yang tepat untuk menilai relasi yang senantiasa berkembang antara Islam dan politik. Pemilu ini bukan sekedar tahapan demokrasi yang rutin tetapi merupakan sarana untuk merenungkan perdebatan ideologis, perkembangan masyarakat, dan strategi politik yang membentuk peran Islam dan politik Indonesia di zaman sekarang. Partai-partai Islam dan organisasi Islam secara aktif telah berpartisipasi dalam proses-proses pemilu dan mereka memberi pengaruh dalam tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan nasional sambil menghadapi tantangan yang muncul dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik (Utami et al., 2024). Dinamika kampanye dan hasil pemilu itu sendiri menunjukkan banyak hal tentang aspirasi, keterbatasan dan transformasi Islam politik di Indonesia saat ini.

Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ada sekitar 200 juta pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 2024. Pemilu tersebut diikuti 24 partai politik dan beberapa di antaranya adalah partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sosial, dan Partai Bulan Bintang. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi tantangan yang besar untuk tetap bisa masuk ke parlemen nasional. Data menunjukkan perolehan partai-partai Islam semakin menurun. Hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menunjukkan bahwa hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mampu menembus parlemen dengan melewati ambang batas parlemen sebesar 4%, Partai tersebut mampu memperoleh suara nasional sebanyak 12.781.353, atau 8,42%, mengalami kenaikan sebanyak 0,21%. Jika dikonversi menjadi kursi, kursi yang diperoleh adalah 53. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya gagal mengirimkan anggotanya ke parlemen nasional, sejak keikutsertaannya dalam pemilu. Partai Bulan Bintang terakhir berhasil masuk ke parlemen pada pemilu 2004. Partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional tidak mengklaim diri sebagai partai Islam tetapi partai yang berbasis pada umat Islam. Mereka berhasil mempertahankan eksistensinya di parlemen. PKB mendapatkan suara sebanyak 16.115.655 atau 10,62%, mengalami kenaikan sebanyak 0,93% dan kursi sebanyak 68 dari sebelumnya 58. PAN meraup suara sebanyak 10.984.003 atau 7,24%, atau naik sebanyak 0,4% dan dikonversi menjadi sebanyak 48 kursi atau naik 4 kursi dari pemilu sebelumnya.

Pengabdian ini bertujuan Memberikan pendidikan politik tentang hasil-hasil pemilu tahun 2024, terutama terkait dengan perolehan suara partai-partai Islam yang menunjukkan kecenderungan untuk menurun dari pemilu ke pemilu. Partai Islam menjadi tema pembahasan karena menjadi perhatian dari para jamaah yang aktif dalam kegiatan pengajian dan kajian.

## METODE

Kegiatan diawali dengan pemaparan dalam bentuk ceramah. Peserta adalah para jamaah yang berkumpul setelah shalat maghrib. Setelah ceramah dilakukan tanya jawab. Dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan, bisa dilihat adanya antusiasme dan peningkatan pemahaman terhadap persoalan. Kegiatan bertempat di Masjid Attanwir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat

---

## HASIL PEMBAHASAN

### Masjid dan Edukasi Politik

Bagi umat Islam, masjid merupakan tempat yang sangat penting. Selain sebagai sarana ibadah, masjid dipergunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Apalagi, struktur bangunan masjid yang tidak menggunakan bangku dan dipan memudahkan pengumpulan jamaah dalam jumlah yang banyak. Dalam sejarah, Nabi Muhammad sering menggunakan masjid untuk mengumpulkan sahabat dan mendiskusikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat. Mereka bermusyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Bahkan, Nabi dikabarkan pernah menerima tamu yang beragama non-Muslim di dalam masjid. Jika menilik pada fungsi sejarah dan kontemporer masjid, masjid memiliki potensi sebagai pusat dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan sosial (Okuyucu, 2016). Singkatnya, pada awal sejarah Islam, masjid berfungsi untuk menjadi titik temu kegiatan masyarakat, termasuk pendidikan agama, wacana politik, dan pendidikan, sehingga masjid memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam (Suratkon et al., 2017).

Universitas terkenal di Mesir, Universitas Al-Azhar, pada awalnya merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di masjid Al-Azhar. Hal tersebut bermula ketika Mesir berada di bawah kekuasaan Bani Fatimiah yang menganut paham Syiah Isma'iliyah. Masjid Al-Azhar dibangun pada tahun 940 Masehi. Materi pertama yang diajarkan di masjid tersebut adalah tentang fikih Syiah dan pengajarnya bernama Abul Hasan Ali bin Al-Numan pada tahun 975 Masehi. Apa yang terjadi di Mesir tersebut kemudian ditiru oleh umat Islam di berbagai belahan dunia lain. Di Indonesia, hampir semua masjid menyelenggarakan pendidikan, terutama untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Dalam perkembangannya, masjid tidak hanya mengoleksi buku-buku agama, tetapi juga buku-buku yang terkait dengan pengetahuan umum.

Dalam pengertian ini, masjid telah menjadi ruang publik di mana masyarakat secara bebas membicarakan persoalan masyarakat. Menurut Habermas, ruang publik adalah wilayah kehidupan sosial di mana bisa dibentuk sesuatu yang mendekati opini publik (Asif et al., 2024). Konsep masjid sebagai ruang publik mendorong sebuah pendekatan komprehensif terhadap manajemen masjid, yang menekankan pentingnya memberikan berbagai pelayanan dan program untuk mengatasi kebutuhan umat

Secara arsitektur, pembangunan dan desain masjid mencerminkan ideologi politik, identitas nasional, dan perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh asing (Dana et al., 2011). Dalam berbagai masyarakat, arsitektur dan kegiatan masjid sering mencerminkan dinamika sosial-politik masyarakat, yang menegaskan identitas group atau menegosiasikan kehidupan bersama (Putrie et al., 2018).

Yang menjadi pertanyaan apakah tempat ibadah diperbolehkan untuk menjadi kegiatan politik. Politik masjid memang secara signifikan bisa mempengaruhi otoritas agama, menurunkan kepercayaan, menyebabkan fragmentasi internal, dan kecemasan terkait kebebasan beragama. Ketika para pemimpin masjid terlibat secara terang-terangan dalam kegiatan politik atau beraliansi dengan agenda politik tertentu, maka legitimasi spiritual mereka akan dipertanyakan oleh para jamaah yang melihat petunjuk agama dipergunakan untuk kepentingan politik bukannya agama. Dinamika ini sering mengakibatkan berkurangnya pengaruh agama dan memecah komunitas agama sebagai kelompok yang berlomba untuk berebut kekuasaan, yang sering membawa pada persaingan organisasi atau radikalisme di dalam masyarakat.

Keterlibatan agama dalam urusan masjid seperti menunjuk imam atau mengatur isi khutbah akan memperumit relasi dan meruntuhkan otonomi institusi agama dan berpotensi mengganggu kebebasan

beragama. Hal tersebut seperti ditunjukkan dalam praktek di negara Turki yang memiliki kementerian agama dan menjalankan propaganda pemerintah dengan mengirimkan pesan-pesan melalui khutbah jumat. Negara lain seperti Indoensia juga pernah mengalami kontrol isi khutbah dan ceramah agama pada zaman Orde Baru. Di sisi lain, beberapa kyai sering menafsirkan ajaran islam untuk memenuhi kebutuhan sosial politik sambil mendukung agenda pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga mencampurkan antara otoritas agama dengan keterlibatan politik (Ja'far, 2024).

Bagaimana jika kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan di masjid? Di Indonesia Banyak pihak yang melarang penggunaan masjid untuk kampanye politik praktis. Mereka beralasan bahwa kampanye di tempat ibadah akan meningkatkan politik identitas yang bisa membelah persatuan umat. Menurut Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13/2024 dan Pasal 69 UU 8/2015, para politisi dan calon pejabat tidak diperbolehkan untuk berkampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang dialami oleh NR Kurnia Sari, caleg Partai Gerindra di Dapil V Jawa Tengah. Ia didenda lima juta rupiah dan kurungan dua bulan (Adelia, 2019).

## **Pemaparan Edukasi Politik**

### **1. Partai-Partai Islam dalam Pentas Pemilu 2024**

Pemilu legislatif dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten/kota, selain memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu legislatif 2024 dilaksanakan, bertepatan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan yang sama, yakni 2024-2029. Pada tahun yang sama, namun pada tanggal 27 November 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak. Ini merupakan kesempatan pertama penyelenggaraan pemilihan eksekutif dan legislatif, nasional dan daerah, secara bersamaan di tahun yang sama.

Pemilu legislatif 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Jumlah ini meningkat dibandingkan pemilu yang sama pada tahun 2019 yang diikuti 20 partai politik, termasuk partai lokal Aceh. Meskipun banyak partai politik yang berkompetisi pada pemilu 2024, namun hanya 8 partai yang dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa mengirimkan anggotanya di parlemen nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil memperoleh suara tertinggi sebanyak 25.387.279 atau 110 kursi meski mengalami penurunan sebanyak 18 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya. Partai lain yang mengalami penurunan suara adalah Partai Demokrat, dari 54 kursi menjadi 44 kursi, atau turun sebanyak 10 kursi. Kejutan lain adalah kegagalan Partai Persatuan Pembangunan mempertahankan eksistensinya di parlemen, di mana partai ini hanya memperoleh sebanyak 5,878,777 suara atau 3.87%.

**Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik**

<b>Nama Partai</b>	<b>Peroleh suara</b>	<b>Presentase</b>	<b>Kursi</b>
Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan	25,387,279	16.72	110

Partai Golongan Karya	23,208,654	15.29	102
Partai Gerakan Indonesia Raya	20,071,708	13.22	86
Partai Kebangkitan Bangsa	16,115,655	10.62	68
Partai Nasional Demokrat	14,660,516	9.66	69
Partai Keadilan Sejahtera	12,781,353	8.42	53
Partai Demokrat	11,283,160	7.43	44
Partai Amanat Nasional	10,984,003	7.24	48

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Selain Partai Persatuan Pembangunan, terdapat partai lain yang gagal mendapatkan suara 4%. Mereka adalah Partai Ummat 642,545 atau 0.42 % dan Partai Bulan Bintang atau 0.32 %. Partai Keadilan Sejahtera merupakan satu-satunya partai Islam yang memiliki konsistensi untuk berada di parlemen nasional sejak tahun 1999.

## **2. Keberhasilan dan Kegagalan Partai-Partai Islam**

### **a) Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS, didirikan pada tahun 1998 setelah gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Soeharto, dan pada awalnya bernama Partai Keadilan. PKS tumbuh dari gerakan mahasiswa dan gaya organisasinya dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di tahun-tahun awalnya, partai ini ditandai dengan pengembangan kader, mobilisasi tingkat akar rumput, dan disiplin internal serta gerakan anti-korupsi (Hamayotsu, 2011)

Sebagai partai berasaskan Islam, PKS memiliki misi untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dengan menekankan keadilan sosial, kesejahteraan, dan moralitas, mendukung sistem keuangan dan kebijakan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Hariyanto et al., 2023). Meskipun memiliki akar kuat pada Islamisme, PKS menyatakan menerima Pancasila dan berusaha menyeimbangkan antara aspirasi Islam dengan persatuan bangsa (Minardi, 2018).

Konstituen utama dari PKS adalah masyarakat Muslim urban yang terdidik, terutama mereka yang aktif dalam organisasi Islam dan gerakan mahasiswa Islam. Anggota partai ini tersebar ke kota-kota besar

dan di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi. Dengan struktur organisasi yang rapi, partai mampu menjalankan program yang terkait erat dengan masyarakat, seperti pelayanan sosial, yang melibatkan masyarakat, sehingga mampu menjadi jembatan untuk membangun loyalitas dan meluaskan jangkauan pengaruhnya (Hamayotsu, 2011). Basis lain keanggotaan PKS adalah kaum muda dan perempuan.

PKS merupakan partai yang aktif dalam mempromosikan gerakan anti-korupsi, mendorong kebijakan yang kesejahteraan rakyat, dan reformasi pendidikan. Dengan keberhasilan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen, PKS telah menempatkan banyak wakilnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri, dan kepala daerah. Partai ini dikenal fleksibel dalam membangun koalisi dengan partai baik yang berbasis agama maupun nasionalisme, sehingga bisa berpartisipasi dalam pemerintah dan memberi pengaruh pada kebijakan nasional.

Sebagaimana partai lain, PKS juga pernah ditimpa isu korupsi dan perpecahan internal. Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS tahun 2009-2014, terjerat dalam kasus korupsi dan mendapatkan pidana penjara. Perpecahan internal terjadi ketika Anis Matta, Presiden PKS tahun 2013 - 2015 menyatakan keluar dari partai dan mendirikan institusi baru bernama Partai Gelora bersama dengan kader PKS yang lain seperti Fahri Hamzah.

Pada Pemilu 2024, PKS berhasil memenangkan pemilu legislatif di Jakarta, sebuah prestasi yang merupakan pengulangan dari pemilu tahun 2004. Partai ini berhasil memperoleh suara sebanyak 1.012.028 suara atau 16,68 %, mengalahkan PDIP yang menempati urutan kedua dengan 850.174 suara atau 14,01 persen (Putri, 2024).

Menurut Presiden PKS, Ahmad Syaikh, partainya menerapkan lima strategi untuk memperoleh kemenangan, yaitu pertama, politik silaturahmi. Hal ini dilakukan dengan memperbanyak komunikasi dan kunjungan ke berbagai komponen anak bangsa. Kedua, politik pemberdayaan, yaitu menciptakan program dan kegiatan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengkampanyekan pencegahan politik uang yang bisa merusak kehidupan berdemokrasi. Ketiga, politik gagasan, yaitu menawarkan solusi-solusi yang efektif dan efisien terhadap berbagai persoalan masyarakat dan negara. Keempat, politik keberpihakan, seperti menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kelima, politik kebangsaan, yang berarti bahwa PKS bersikap terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dalam kerangka untuk membangun negara (PKS, n.d.).

b) Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP merupakan partai bentukan pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada tahun 1973. Ia merupakan fusi dari empat partai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Partai ini dibentuk dalam kerangka penyederhanaan sistem partai politik di Indonesia. Saat itu terdapat 10 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1971. Jumlah ini dianggap terlalu banyak oleh Presiden Soeharto. Tindakan politik Presiden Soeharto tersebut juga bertujuan untuk membatasi kelompok oposisi dan mengontrol aspirasi politik Islam.

Nilai-nilai Islam merupakan dasar ideologi PPP, karena partai ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam di dalam kerangka ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu, PPP mempromosikan moralitas Islam, yang mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam

bersikap, partai ini mengadopsi pendekatan pragmatis dalam konteks pluralisme Indonesia. Dalam sejarahnya, partai ini mengklaim sebagai rumah besar bagi umat Islam di Indonesia.

Selama berkiprah dalam panggung politik nasional, PPP telah memainkan peran yang penting, meskipun mengalami pasang naik dan turun. Pada masa Orde Baru, partai ini selalu menempati urutan kedua, di bawah Golkar. Setelah Orde Baru tumbang, banyak bermunculan partai-partai Islam atau partai yang berbasis umat Islam, dari kelompok atau organisasi yang merupakan pilar dan lumbung suara PPP. Dari organisasi Nahdlatul Ulama, muncul Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 1998 yang dideklarasikan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum PBNU. Pada saat yang bersamaan, lahir Partai Kebangkitan Umat, yang dipimpin oleh KH Jusuf Hasyim, yang merupakan paman Gus Dur. Dari tokoh-tokoh organisasi modernis, Muhammadiyah, lahir Partai Amanat Nasional, yang dideklarasikan oleh Amien Rais pada tahun 1998. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa dengan banyaknya partai baru yang berasal dari umat Islam, keberadaan PPP akan menghilang. Tapi Pemilu 1999 menunjukkan bahwa partai ini mendapatkan suara 11.329.905 atau 10.71%, dan dikonversi menjadi 58 kursi. Jumlah tersebut menurun sebanyak 31 kursi dari 88% atau 22.43% suara nasional dari pemilu 1997 ketika banyak elemen partai lain bergabung dengan PPP sebagai ungkapan kekecewaan terhadap penguasa Orde Baru yang dianggap bertindak tidak adil terhadap Partai Demokrasi Indonesia. Perolehan suara PPP di Pemilu 1999 lebih tinggi dari partai berasas Islam yang lain seperti PBB yang hanya memperoleh suara 2.049.708 atau 1.94% dan dikonversi menjadi 13 kursi, dan Partai Keadilan dengan perolehan suara 1.436.565 atau 1.36%.

Dalam era Reformasi, PPP menempatkan diri sebagai partai dengan perolehan suara berada di papan menengah. Tetapi jumlah tersebut terus menurun drastis hingga mengalami titik terendah pada pemilu 2019 dengan perolehan suara 6.323.147 atau 4.52% dan dikonversi menjadi 19 kursi dari sebelumnya 7,0% atau 39 kursi. Ada banyak analisa tentang trend menurun popularitas dan elektabilitas PPP, yang bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Di antara faktor internal adalah pertama, konflik kepemimpinan yang melibatkan Suharso Monoarfa, yang merupakan Ketua Umum hasil Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 19 Desember 2020, dengan Muhammad Mardiono yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum untuk sisa masa bakti 2020-2025. Konflik sebelumnya juga terjadi antara Kubu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuzy. Kedua, kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh partai seperti Ketua Umum Romahurmuzy yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 15 Maret 2019 dan Suryadharma Ali yang terlibat kasus korupsi dana haji pada tahun 2014. Suharso Monoarfa saat menjadi ketua umum terlibat dalam kasus “amplop untuk kyai”. Konflik dan kasus-kasus korupsi tersebut memberikan persepsi negatif terhadap PPP yang menghambat konsolidasi partai. Selain itu, pergantian pimpinan yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan umum telah membuat buyar simpul-simpul konsolidasi partai. Faktor internal lain adalah kurangnya logistik yang sangat dibutuhkan untuk membiayai konsolidasi, kampanye, dan branding partai (Rastika, 2024).

Faktor eksternal di antaranya adalah adanya kehadiran partai Islam lain atau partai yang berbasis komunitas Islam meskipun tidak mengklaim diri sebagai partai Islam. PPP nampak gagal dalam melakukan kaderisasi dan menampilkan citra politik yang bersih dan melayani rakyat. Di sisi lain, masyarakat Muslim memiliki preferensi politik yang lebih beragam, dan tidak menjadikan partai Islam sebagai satu-satunya saluran aspirasi politik. Selain itu, PPP terlihat salah langkah dalam berkoalisi. Sebagai partai Islam, PPP justru berkoalisi dalam Pemilihan Presiden dengan PDIP yang merupakan partai nasionalis yang sering

dianggap cenderung sekular. PPP mendukung pasangan Ganjar-Mahfud. Pilihan tersebut gagal memberi efek domino untuk meningkatkan suara pemilih partai.

c) Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang atau PBB didirikan pada 17 Juli 1998 oleh tokoh-tokoh yang terinspirasi oleh Partai Masyumi. Ideologinya adalah Islam modernis, dengan semangat untuk mempromosikan pelaksanaan syariah Islam dalam sistem hukum di Indonesia dan mendorong Islam sebagai jalan hidup. Pelaksanaan hukum Islam tersebut ditempuh melalui perjuangan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Menurut basis politik, pendukung utama PBB berasal dari luar pulau Jawa, terutama di Bangka Belitung, tempat kelahiran Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, Sumatera barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam panggung politik nasional, PBB berhasil menempatkan kadernya di parlemen nasional sebanyak dua kali, yaitu pada Pemilu 1999 sebanyak 13 kursi, yang merupakan konversi dari 2.049.708 suara atau 1,94%. Pada Pemilu 2004, PBB memperoleh suara sebanyak 2.970.487 atau 2,62%, dan dikonversi menjadi kursi sebanyak 11.

Meskipun PBB berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum dan mengikuti pada Pemilu Legislatif tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024, namun ia tidak bisa mencapai ambang batas 4 persen suara syah nasional sebagai syarat untuk bisa mengirimkan anggotanya. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan kegagalan tersebut PBB di Pemilu 2024. Pertama, ketidakselarasan antara keputusan pimpinan partai untuk mendukung kubu Prabowo-Gibran dengan keinginan massa. Banyak pendukung yang menilai dukungan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diusungnya. Apalagi para pemilih yang independen dan ideologis, bersamaan dengan para ulama yang berpengaruh, tidak mendukung keputusan pimpinan PBB. Kedua, minimnya tokoh alternatif di luar Yusril Ihza Mahendra, sehingga PBB kekurangan tokoh partai yang bisa menyatukan suara, membangun jaringan ke berbagai pelosok, dan melakukan langkah strategis untuk membesarkan partai dan meluaskan dukungan di luar basis tradisional. Materi kampanye yang hanya menekankan penerapan Syariah Islam dianggap tidak lagi mencerminkan persepsi publik masyarakat Indonesia secara umum yang lebih menginginkan prinsip-prinsip masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan kebangsaan. Terakhir, PBB sebagai saluran aspirasi umat Islam mendapatkan kompetisi dari partai lain yang lebih solid dan militan seperti Partai Keadilan sejahtera. PBB membutuhkan kepemimpinan baru, dan reformasi yang signifikan, dan branding baru sebagai partai yang memperjuangkan kebutuhan konkret rakyat.

d) Partai Ummat

Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pendiri partai Amanat Nasional. Partai ini dipimpin oleh Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais. Partai ini lahir sebagai dampak dari konflik mendalam di dalam Partai Amanat Nasional setelah kongres tahun 2020 di mana Amien Rais dan para pendukungnya kalah dari Zulkifli Hasan yang berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PAN. Perbedaan tersebut terutama di sekitar arah politik PAN yang mendukung pemerintahan Joko Widodo. Padahal Amien Rais dan para pendukungnya cenderung beroposisi.

Partai Ummat berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ia memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, mempromosikan ajaran Islam berdasarkan Al-



Quran dan Sunnah, melakukan pengkaderan secara aktif sehingga bisa menghasilkan kader yang ideologis yang kuat, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip Islam. Retorika partai menunjukkan bahwa partai ini ingin menjadi pembela umat Islam dan pejuang melawan ketidakadilan sosial dan politik, dengan mengelorakan sentimen populis Islam sambil menjaga pandangan nasional berdasarkan Pancasila. Partai Ummat dinyatakan lolos verifikasi KPU dan mengikuti Pemilu 2024. Namun, partai ini hanya memperoleh suara sebanyak 642.545 atau 0,42%.

Penyebab kegagalan tersebut kemungkinan disebabkan beberapa faktor. Pertama, singkatnya masa kampanye untuk memperluas jaringan dan basis massa. Meskipun partai ini mungkin mampu menarik massa dari kelompok Islam konservatif dan memposisikan diri sebagai alternatif terhadap partai-partai yang ada, tetapi ia gagal merebut suara massa yang selama ini telah menjadi basis dari partai yang telah mapan seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional (Ferdinan, 2022). Kedua, Partai Ummat mengusung platform politik Islam konservatif dan populis, yang tidak sejalan dengan realitas masyarakat Indonesia yang lebih menginginkan partai politik yang terbuka dan pluralis. Ketiga, partai ini menekankan agenda pelaksanaan nilai-nilai Islam dan menentang ketidakadilan tetapi tidak cukup bisa menunjukkan program yang menarik masyarakat lebih luas terutama kelompok moderat dan kelompok non-Muslim.

### ***Pertanyaan Peserta***

Setelah dilakukan pemaparan mengenai posisi partai Islam dalam Pemilu 2024, muncul beberapa pertanyaan dari peserta.

1) Mungkinkah masyarakat Muslim Indonesia memiliki satu partai politik ?

Menurut pembicara, untuk saat ini sangat sulit untuk mewujudkan adanya satu partai Islam yang bisa menampung aspirasi seluruh umat Islam. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal. Pertama, perbedaan para elite dalam menerjemahkan perjuangan politik. Ada elite yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi masing-masing Muslim memiliki komitmen yang berbeda terhadap pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. Di dalam beberapa kelompok Muslim, terutama yang disebut santri, ada yang menginginkan pelaksanaan ajaran Islam secara formal, sedangkan yang lain merasa bahwa ajaran Islam cukup dilaksanakan secara substantif mengingat masyarakat Indonesia yang plural. Di lain, pihak, dalam masyarakat Muslim yang dikenal abangan, banyak beranggapan bahwa yang dibutuhkan adalah partai yang mengakomodir dan menjawab kebutuhan konkret masyarakat, tanpa harus diberi embel-embel agama. Dengan perbedaan pemahaman tentang karakter partai politik yang harus ditegakkan tersebut, maka tidak mungkin mewujudkan satu partai Islam saja. Kedua, di antara beberapa elite memiliki sikap egois dan merasa berhak untuk tampil memimpin partai. Jika sikap egois dimiliki para pemimpin Islam, maka hal tersebut tidak mungkin bisa diakomodir dalam satu partai.

2) Apakah kekalahan partai-partai Islam akibat pendanaan yang minim?

Menurut pembicara, sebagaimana ditegaskan dalam paparan di atas, partai-partai Islam yang berhasil ke parlemen selama ini hanya menduduki peringkat menengah. Sejak reformasi, belum ada partai Islam yang berhasil memenangi pemilu dalam skala nasional. Salah satu aspek yang menjadi persoalan adalah kekurangan logistik. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan kurang lebih 60 % pemilih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk memenangkan suara masyarakat, dibutuhkan kampanye yang efektif dan menyentuh masyarakat. Untuk wilayah perkotaan dan pedesaan yang telah terjangkau internet,

kampanye bisa dibantu dengan media sosial yang secara biaya relatif lebih murah. Masalahnya, kampanye media sosial sering tidak berhasil memberi kesan personal. Apalagi, kampanye seperti ini dilakukan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, solusinya adalah perlunya melakukan kampanye secara offline, dengan melakukan kunjungan dari pintu ke pintu, yang jelas membutuhkan biaya banyak.

Dana tidak hanya diperlukan untuk kampanye tetapi juga kebutuhan mengawal suara setelah pencoblosan. Apalagi potensi kecurangan justru terjadi setelah suara dihitung dan dinaikkan ke tingkat kelurahan dan jenjang berikutnya. Dalam hal ini, partai-partai Islam kekurangan dana. Partai-partai baru juga umumnya memiliki pendanaan terbatas dan dipimpin oleh para pemimpin dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Maka, tidak mengherankan jika partai-partai Islam dan partai-partai baru non-Islam kewalahan dalam mendapatkan suara, dan sering gagal dalam setiap pemilu.

## KESIMPULAN

Pemaparan edukasi politik tentang posisi partai Islam dalam kontestasi Pemilu 2024 ditutup setelah menerima dua pertanyaan. Dalam kegiatan ini tidak dilakukan penilaian sebelum dan setelah kegiatan, karena kegiatan lebih bersifat informal, dan tujuan dasarnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, M. K. (2019, May 10). Terbukti Kampanye di Tempat Ibadah, Caleg Gerindra Divonis Dua Bulan dan Denda Rp5 Juta. *Akurat*. <https://www.akurat.co/daerah/1302080657/Terbukti-Kampanye-di-Tempat-Ibadah-Caleg-Gerindra-Divonis-Dua-Bulan-dan-Denda-Rp5-Juta>
- Asif, N., Utaberta, N., Ismail, S., & Sabil, A. (2024). Rethinking the Institution of Masjid as a community development center in Bangladesh. *Journal of Islamic Architecture*, 8(2), 437–449. <https://doi.org/10.18860/jia.v8i2.21275>
- Dana, K., Barreto, M. A., & Oskooii, K. A. R. (2011). Mosques as American institutions: Mosque Attendance, Religiosity and Integration into the Political System among American Muslims. *Religions*, 2(4), 504–524. <https://doi.org/10.3390/rel2040504>
- Ferdinan. (2022, July 13). Predicted not to pass to parliament, The Ummat Party asks for prayers for the blessing of the Indonesian people. *VOI.ID*. <https://voi.id/fr/berita/189767>
- Hamayotsu, K. (2011). The political rise of the Prospero Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia. *Asian Survey*, 51(5), 971–992. <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.5.971>
- Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 244–261. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261>
- Ja'far, A. (2024). Kiai kampung and Traditional Islamic orthodoxy: A Socio-religious Study of Mosque-based authority in Rembang, Central Java, Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 32(2), 195–216. <https://doi.org/10.21580/ws.32.2.23455>
- Mahn, T. (2016). The United Nations in development: Confronting fragmentation? In *The Fragmentation of Aid* (pp. 247–260). Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-55357-7\\_17](https://doi.org/10.1057/978-1-137-55357-7_17)

- Minardi, A. (2018). The New Islamic Revivalism in Indonesia : Accommodationist and Confrontationist. *Journal of Indonesian Islam*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.15642/jiis.2018.12.2.247-264>
- Noor, F. (2016). Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia. *Studia Islamika*, 23(1), 61–103. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2808>
- Nurlatifah, H., Saefuddin, A., Nanere, M., & Ratten, V. (2022, January 1). *Muslimpreneur: Entrepreneur potential characteristics in Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world*. Springer Nature Singapore. [https://link.springer.com/10.1007/978-981-16-4795-6\\_12](https://link.springer.com/10.1007/978-981-16-4795-6_12)
- Okuyucu, Ş. E. (2016). Evaluation of spatial fictions, design concepts, aesthetic quests of traditional, modern mosques from past to present and the analysis of mosque samples. *Civil Engineering and Architecture*, 4(2), 54–66. <https://doi.org/10.13189/cea.2016.040203>
- PKS. (n.d.). *Lima Pilar PKS dalam Meraih Kemenangan di Pemilu 2024*. Retrieved July 15, 2025, from <https://pks.id/content/lima-pilar-pks-dalam-meraih-kemenangan-di-pemilu-2024>
- Putri, L. M. (2024, March 12). PKS raih urutan pertama perolehan suara DPRD DKI Jakarta. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/4005786/pks-raih-urutan-pertama-perolehan-suara-dprd-dki-jakarta>
- Putrie, Y. E., Martokusumo, W., & Budi, B. S. (2018). Maintaining or negotiating identity: The socio-political dynamics of community mosques in Malang, East Java, Indonesia. *Journal of Islamic Architecture*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.18860/jia.v5i1.4431>
- Rastika, I. (2024, December 11). Mardiono Ungkap Kekalahan PPP Pilkada dan Pileg karena Kekurangan Logistik. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/12/06243191/mardiono-ungkap-kekalahan-ppp-pilkada-dan-pileg-karena-kekurangan-logistik>
- Suratkon, A., Abd Salam, N. N., Rahmat, M. H., Mohd Arhan, A. S., Abd Wahab, I., & Ghaffar, S. A. (2017). Woman-friendly mosque, features and facilities: A case study on masjid sultan ibrahim, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 291, 012019. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/291/1/012019>
- Utami, D. M., Ikhsan, M., Dartanto, T., & Mallarangeng, R. (2024). The role of the 30% threshold for Islamic parties: A fast-growing middle class and religion-based political preferences in